

ABSTRAK

Tesis ini akan mengupas dan membahas agar dapat menganalisis serta dapat mengetahui mengenai eksistensi atau dampak yang timbul adanya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap peraturan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR) di Kabupaten Brebes. Mengenai pelaksanaan urusan tata ruang yang ada saat ini sudah digabungkan ke dalam satu Kementerian yang mengurus Agraria dan pertanahan yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Akan tetapi pelaksanaannya di daerah-daerah khususnya di daerah Kabupaten Brebes masih terpisah urusan tata ruang dengan urusan agraria dan pertanahan, mengakibatkan munculnya permasalahan-permasalahan di dalam masyarakat Kabupaten Brebes dalam hal urusan tata ruang.

Dalam pembuatan tesis ini, peneliti menggunakan analisis data dengan metode *juridic empiris*, artinya peneliti meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan meneliti data primer di lapangan atau masyarakat.. Spesifikasi penelitian yakni menganalisis data primer, analisis data sekunder dan analisis data tersier. Metode *deskriptif analitis* dipilih untuk menunjang pengkajian, guna menganalisis data penelitian.

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut: eksistensi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap peraturan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR) di Kabupaten Brebes terdapat dualisme kebijakan terkait urusan tata ruang antara Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dengan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR). Integrasi atau penggabungan lembaga yang mengurus tata ruang dengan lembaga yang mengurus agraria dan pertanahan tidak dapat berjalan dengan baik di daerah Kabupaten Brebes. Kebijakan yang membuat proses perijinan tentang tata ruang menjadi lama. Pelaksanaan tata ruang di daerah Kabupaten Brebes masih dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR) yang masih berpedoman Pemerintah Daerah bahwa urusan tata ruang masih menjadi kewenangan Sub bagian Kementerian Pekerjaan Umum, padahal di pusat urusan tata ruang sudah digabungkan ke dalam satu kementerian yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kelemahan urusan tata ruang di Kabupaten Brebes yakni belum ada perwakilan dari pusat di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes yang menangani dan mengurus urusan tata ruang.. Solusi atau saran dari hal tersebut oleh peneliti bahwasanya urusan tata ruang sulit untuk disatukan atau digabungkan dengan urusan agraria dan pertanahan yang ada di daerah khususnya di Kabupaten Brebes. Seharusnya terpisahkan dan dikembalikan ke dalam Sub bagian Pekerjaan Umum.

Kata Kunci: Eksistensi, Kementerian, Tata Ruang, Dinas.

ABSTRACT

This thesis will be analyzed and discussed in order to analyze and know about its existence or impact arising out of the existence of the Ministry for Agrarian and Spatial/national land Agency against the rules of the service management of water resources and Spatial (DPSDAPR) in Brebes Regency and the implementation of existing spatial Affairs in the area of Brebes Regency, while the space in the center of affairs already combined into a single Ministry with Agrarian namely Ministry of Agrarian and Spatial/ National Land Agency.

In the making of this thesis, researchers with data analysis using several methods, namely in the form of an analysis of the primary data, secondary data analysis and data analysis of the tertiary. Method descriptive qualitative study to support selected, in order to analyze the research data.

Based on the results of data analysis it can be summed up as follows: the existence of the Ministry of Agrarian and Spatial/national land Agency against the rules of the service management of water resources and Spatial (DPSDAPR) in Brebes Regency there is related spatial policy dualism between the Office of land Management Agency of Brebes Regency with water resources and Spatial (DPSDAPR). Policies that make the process of permitting about spatial became long. Implementation of spatial in Brebes Regency area are still funded by the Department of management of the water resources and Spatial (DPSDAPR), but in the center of spatial Affairs already digabungkan into one Ministry namely Ministry of Agrarian and Spatial/ National Land Agency.

Keywords: Existence, Ministries, Spatial, Office.